

**TELAAH KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SECARA LANGSUNG  
TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna  
Meraih Derajat S1 dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**LUQMAN NABIL**

**NIME0017275**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2021**

*commit to user*

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

### TELAAH KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SECARA LANGSUNG TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

Oleh:

LUQMAN NABIL

NIM. E0017275

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 18 Januari 2021

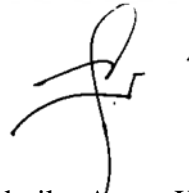
Dosen Pembimbing I



Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum

NIP. 197805012003121002

Dosen Pembimbing II



Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H

NIP. 197004241995121001

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TELAAH KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAYKAT  
DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SECARA  
LANGSUNG TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Oleh

**Luqman Nabil**

**NIM. E0017275**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Januari 2021

**DEWAN PENGUJI**

1. Dr. Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H. :

NIP. 198107212005012003

Ketua

2. Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. :

NIP. 197805012003121002

Sekretaris

3. Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H. :

NIP. 197004241995121001

Anggota

Mengetahui

Dekan,



**Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.**

NIP. 197210082005012001



**SURAT PERNYATAAN**  
(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Luqman Nabil  
NIM : E0017275  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 08 Agustus 1998  
Alamat Rumah : Jalan Tuparev, Kampung Wirasari Nomor 29 Rt/Rw  
04/04, Desa Sutawinangun, Kabupaten Cirebon  
Nomor Telepon/HP : 085694447019

Judul Penulisan Hukum :

TELAAH KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SECARA LANGSUNG TERHADAP  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi/hukum berupa :
  - a. Sebelum lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali
  - b. Setelah lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaaan yang telah diperoleh

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 13 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

  
Luqman Nabil

NIM.E0017275

## ABSTRAK

### **Luqman Nabil. 2021. E0017275 TELAAH KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SECARA LANGSUNG TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi pengawasan dengan berhubungan secara langsung terhadap Badan Usaha Milik Negara, dan kerangka ideal hukum konsep pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Badan Usaha Milik Negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan melalui studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum dengan metode penalaran logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui PMN, sudah bertransformasi menjadi kepemilikan saham negara yang pengelolaannya diwakilkan oleh Menteri BUMN. Oleh karenanya fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN tidak termasuk dalam cakupan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR sebagaimana rumusan Pasal 70 Ayat (3) UU MD3. Berbagai praktik pengelolaan BUMN yang dilakukan oleh banyak negara seperti Singapura dan Switzerland juga membuktikan bahwa BUMN berada dalam garis pemerintahan eksekutif. Konstruksi ideal pengawasan terhadap BUMN dapat dibangun dengan 2 (dua) kerangka utama, yaitu *pertama*, secara teknis dengan melakukan rapat-rapat dan bentuk-bentuk komunikasi lain dengan Menteri BUMN. *Kedua*, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

**Kata Kunci : Pengawasan DPR, Badan Usaha Milik Negara**

**ABSTRACT**

**Luqman Nabil. 2021. AUTHORITY OF THE PARLIAMENT IN EXERCISING THE FUNCTION OF SUPERVISION DIRECTLY ON STATE-OWNED ENTERPRISES IN INDONESIA. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University.**

*This study aims to identify the authority of the Parliament exercising the function of supervision by relating directly to State-Owned Enterprises, and the legal ideal framework for the concept of oversight by Parliament of State-Owned Enterprises.*

*The research method used in this research is a descriptive analytical doctrinal research. This research approach uses a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The types and sources of legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. Technique for collecting materials through document studies. The analysis technique used is a legal materials analysis technique with a method of deductive logic reasoning.*

*The result of study, BUMN capital funded by state assets separated through PMN, has been transformed into state share ownership whose management is represented by the Minister of BUMN. Therefore the DPR's oversight function of BUMN is not included the scope of the DPR's supervisory function as formulated in Article 70 Paragraph (3) of the MD3 Act. Various BUMN management practices carried out by many countries such as Singapore and Switzerland also prove that BUMN is in line with executive government. The ideal concept of supervision of BUMN can be constructed with 2 (two) main frameworks, first, technically by conducting meetings and another communication forms with the Minister of BUMN. Second, the utilization of BPK examination results.*

**Keywords: Supervision of the DPR, State Owned Enterprises**

**MOTTO**

“MANUSIA DAPAT MERENCAKAN SUATU HAL DENGAN SEMPURNA,  
NAMUN PADA AKHIRNYA ALLAH SWT YANG AKAN MEMUTUSKAN  
BAGAIMANA HASILNYA”

**PERSEMBAHAN**

KEPADA ORANG-ORANG TERCINTA, IBU SAYA YULIAWATI, BAPAK  
SAYA ABDUL HAKIM, NENEK DAN KAKEK SAYA ALM. TITI WAHYUTI  
DAN ALM. AGUNG SUGIHONO.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan dituangkan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) dari segala yang kami peroleh dengan judul “**Telaah Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Secara Langsung terhadap Badan Usaha Milik Negara**”.

Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara. Walaupun dengan bahan hukum primer dan sekunder yang terbatas, penulis tetap berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati menerima segala kritik dan saran yang dapat memperluas cakrawala pengetahuan penulis di kemudian hari. Penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini:

1. Ibu Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Pranoto, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan kepada penulis selama mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum;



5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Orang tua penulis yang telah banyak memberikan doa, dukung, dan segala hal yang tidak mampu penulis balaskan.
7. Keluarga besar KDFH UNS yang menjadi rumah pertama bagi penulis dalam mengembangkan potensi diri.
8. Keluarga besar Kementerian Keuangan BEM FH UNS 2018.
9. Keluarga besar BEM FH UNS 2020 khususnya Presidium dan Kementerian Kajian Strategis.
10. Keluarga besar HMI Cabang Surakarta Komisariat FH UNS.
11. Kakak yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada penulis : Mas Rizky, Mas Aji, Mas Ihsan, Mba Reski, Mba Dela, dan Mba Sisy.
12. Teman-teman yang pernah menjadi tim saat berkompetisi : Fida, Mba Aliftha, Ester, Hardiansah, Rahmawati, Aida, Madani yang telah berjuang mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
13. KPK SH : Aufa, Cindy, Destyra, Excel, Fida, Idil, Inneke, Lula, Nabhila, Savira, Yoakim dan Emkape : Farhan, Firda, Ibeth, Intan yang sangat mewarnai jejak langkah penulis selama belajar di Fakultas Hukum.
14. Saudara, teman, dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Demikian Pengantar ini saya sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk memperkaya cakrawala pengetahuan penulis.

Surakarta, Januari 2021

Penulis,



Luqman Nabil

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTO PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan .....	11
2. Tinjauan tentang Lembaga Perwakilan.....	14
3. Tinjauan tentang Fungsi Pengawasan DPR .....	16
4. Tinjauan tentang BUMN .....	19
B. Kerangka Pemikiran.....	23
<b>BAB III : PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Analisis Fungsi Pengawasan DPR terhadap BUMN .....	25
1. Konstruksi Hukum Pengawasan DPR terhadap BUMN.....	26
2. Perbandingan Konsep Pengelolaan BUMN.....	35
B. Konsep Pengawasan Ideal Perwakilan Rakyat terhadap Badan Usaha Milik Negara .....	45

BAB IV : PENUTUP .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

